PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN ACCORDANCE WITH LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING MARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Nasrianti¹, Muhibuddin²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia.

E-mail: nasrianti@unimal.ac.id, muhibuddin@unimal.ac.id

ABSTRAK

Indikasi Geografis sebagai suatu “tanda” mewakili nama asal daerah/wilayah penghasil barang tertentu secara alamiah karena faktor alam atau hasil kreasi manusia yang ada di daerah/wilayah tersebut. Indikasi Geografis merupakan strategi bisnis yang dapat memberikan nilai komersial terhadap produk karena orisinalitasnya yang tidak bisa dimiliki daerah lain. Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis. Pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis kepada Menteri. Dengan kata lain Indikasi Geografis tidak dapat secara serta merta dilindungi oleh hukum Indonesia apabila tidak dilakukan pendaftaran sebelumnya. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis.

ABSTRACT

Geographical Indication, as a "sign," denotes the name of the origin of the area or region that naturally produces particular goods as a result of natural factors or locally-existing human creations. Geographical Indication is a business strategy that can provide commercial value to the product because of its originality that other regions cannot. This study explains how geographic indications are protected legally under Law Number 20 of 2016 Concerning Marks and Geographical Indications. This study uses a normative juridical research method using a statutory approach. According to the findings of the study, the applicant must submit a Geographical Indications Registration Application to the Minister in order to obtain legal protection against geographical indications. In other words, if there is no prior registration, geographic indications cannot be automatically protected by Indonesian law. It is recommended for the government to be able to educate the public about the importance of legal protection against geographical indications.

Keywords: legal protection, geographical Indications.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, sebagai negara yang besar, tanah Indonesia mempunyai berbagai hasil alam dengan keunikan-keunikannya tersendiri. Selain kekayaan alam, Indonesia juga kaya akan budaya masyarakatnya yang mampu menciptakan kreatifitas-kreatifitas yang bersifat khas, diwariskan secara turun temurun dan karena itulah kepemilikannya bersifat komunal. Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi hal yang kian pesat pasca lahirnya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* 1994. TRIPs merupakan kesepakatan internasional paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI. Hal ini tampak dari adanya ketentuan adanya perlindungan Indikasi Geografis yang diatur dalam TRIPs, (Devica Rully Masrur, 2018).

Saat ini, Indonesia merupakan negara yang kaya akan produk potensi indikasi geografisnya seperti, Kopi Gayo, Kopi Kintamani Bali, Lada Hitam Lampung, Lada Putih Muntok, Kopi Toraja, Apel Batu Malang, Keramik Dinoyo, Gerabah Kasongan dan lain-lain. Potensi alam tersebut menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi, jikalau potensi tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai aset perdagangan. Dalam konteks ini, apabila potensi tersebut masuk ke dalam kategori aset bisnis atau perdagangan, maka aturan hukum harus dapat

menjamin agar hak-hak pihak yang memanfaatkan potensi tersebut dapat terlindungi. Apalagi jika potensi tersebut sudah diperdagangkan ke dunia internasional (Indra R, 2014).

Indikasi Geografis merupakan suatu istilah geografis yang berkaitan dengan sebuah produk yang menunjukkan tempat atau daerah asal dan mutu produk yang berasal dari karakter geografis. Faktor geografis suatu daerah/wilayah tertentu dari suatu negara merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi atau karakteristik tertentu dari suatu barang yang akan memperoleh perlindungan indikasi geografis. Dapat dikatakan Indikasi Geografis sebagai suatu “tanda” mewakili nama asal daerah/wilayah penghasil barang tertentu memperlihatkan bahwa objek perlindungan indikasi geografis lebih ke arah barang yang dihasilkan secara alamiah karena faktor alam atau hasil kreasi manusia yang ada di daerah/wilayah tersebut, sehingga memiliki karakteristik khusus (Rahmi Jened, 2015).

Di Indonesia Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 62. Mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Indikasi Geografis dalam

dunia perdagangan merupakan nama dagang yang dikaitkan, dipakai, atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut (Miranda Risang Ayu, 2006).

Keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut (M. Rendi Aridhayandi, 2018). Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Sampai pada tahun 2018, jumlah Indikasi Geografis yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berjumlah 63 (Devica Rully Masrur, 2018). Contoh kasus pelanggaran Indikasi Geografis adalah kasus Kopi Gayo di mana merek dagang tersebut di klaim milik sebuah perusahaan perdagangan asal Belanda sebagai pemegang hak yang notabene Kopi Gayo tersebut adalah khas dari Nanggroe Aceh Darussalam. Perusahaan asal Belanda tersebut (Holland Coffe B. V) mengklaim bahwa perusahaan tersebut merupakan pemilik dari hak merek dagang kopi tersebut dan terdaftar didunia internasional dengan nama Gayo Mountain Coffee (Indra R., 2014). Maka dengan angka yang sangat kecil dan contoh kasus diatas dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan Indikasi Geografis masih sangat rendah, serta kurangnya peran dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melindungi Indikasi Geografis yang berfungsi sebagai strategi bisnis, dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena orisinalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain. Maka sebagai negara anggota yang menyetujui perjanjian TRIPS wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melarang dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat menyesatkan konsumen yang berakibat lebih lanjut dalam bentuk persaingan curang.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas yang menjadi permasalahan

adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (Jhonny Ibrahim, 2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan suatu peraturan dalam konteks teori dan pelaksanaannya secara tepat dan menyeluruh

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka (6) menyebutkan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas,

dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Istilah Indikasi Geografis atau *geographical indications* adalah istilah yang digunakan pada berbagai negosiasi yang dilaksanakan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada pertengahan tahun 1970-an (OK.Saidi, 2003). Sebelum perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Agreement* (TRIPS) disepakati, istilah yang digunakan untuk Indikasi Geografis ada beberapa macam. Asal geografis dari barang-barang (*geographical origin of goods*) berdasarkan doktrin *passing-off* diterapkan dinegara-negara *Common Law*. Di Amerika Serikat dan Inggris, asal geografis (*geographical origin*) dilindungi oleh merek kolektif (*collective marks*) dan *certification marks*. Sedangkan di negara-negara Civil Law, istilah yang digunakan adalah *the appellation of origin*. Untuk mengatasi berbagai kesulitan yang belum dapat diselesaikan dalam melindungi nama-nama produk yang berkaitan dengan tempat, istilah *geographical indication* dimasukkan di dalam TRIPS (Tomi Suryo Utomo, 2010).

Dalam persetujuan TRIPS diatur mengenai Indikasi Geografis yang berkaitan dengan pemakaian merek. Dalam Article 22 (1) persetujuan TRIPS menyebutkan bahwa: “*geographical indications are, for the purpose of this agreement, indications which identify a goods as originating in the territory of a member,*

or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin” (A.A Ngurah Tresna Adnyana, 2019).

Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883 Article 1 (2) menyatakan: *The Protection of Industrial Property has its object Patents, Utility Models, Industrial Designs, Trademarks, Servicesmarks, Tradenames, Indication of Source of Appellation of Origin, and the repression of Unfair Competition*, maka Indikasi geografis menurut ketentuan Konvensi Paris ini hanya merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Pengertian dari Indikasi Geografis juga dapat ditemukan pada ketentuan Article 2 (1) the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin yaitu *“The geographical name of country, region or locality, which serves to designate a product originating therein the characteristic qualities of which are due exclusively or essentially to geographical environment, including natural and human factor”* (Devica Rully Masrur, 2018).

Dapat disimpulkan dari pengertian Article 2 (1) Lisbon Agreement adalah: *Pertama*, penamaan atas barang/produk harus dengan nama geografis sebuah negara, wilayah atau daerah. *Kedua*, penamaan tempat asal harus menunjukkan bahwa barang atau produk tersebut berasal dari negara, wilayah atau daerah. *Tiga*, harus ada kualitas dan karakteristik pada barang

atau produk yang berasal dari daerah geografis tersebut. Kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat mendasar dalam menentukan suatu penamaan tempat asal. Kualitas dan karakteristik tersebut ditentukan oleh faktor alam dan manusia

Dapat dikatakan bahwa Indikasi Geografis adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah dalam wilayah tersebut asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan kata lain Indikasi Geografis adalah asal suatu barang (termasuk jasa) yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis. Jadi Indikasi Geografis mencakup elemen sebagai berikut:

1. identifikasi barang yang berasal dari wilayah, atau regional atau lokalitas dalam wilayah negara anggota.
2. Atas wilayah tersebut diberikan kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari barang
3. Yang secara esensial memberikan attribute pada asal geografis tersebut (H. OK Saidi, 2003).

Indikasi Geografis yang diatur dalam undang-undang merek Indonesia mengadopsi definisi Indikasi Geografis yang terdapat dalam Pasal 22.1 Perjanjian TRIPS, dimana terdapat beberapa unsur penting dari Indikasi Geografis yaitu, kata “indikasi” tidaklah harus merujuk

pada nama sebuah tempat tetapi juga dapat mencakup nama produk yang diasosiasikan dengan sebuah tempat, meskipun Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Merek, maka Indikasi Geografis tidaklah sama dengan Merek. Dalam perjanjian TRIPS Indikasi Geografis tidak dapat dimiliki oleh seseorang tetapi lebih berfungsi sebagai pengenalan yang digunakan oleh produser di sebuah tempat. Karakter inilah yang membedakan antara Indikasi Geografis dengan sebuah Merek (Tomi Suryo Utomo, 2010). Perjanjian TRIPS produsen dilarang untuk memakai label atau tanda (atau merek) terhadap barang yang diproduksinya, yang tidak sesuai dengan Indikasi Geografis, misalnya mencantumkan label “Kopi Arabika Gayo” yang tidak diproduksi di Gayo. Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal kopi Arabika Gayo, karena faktor lingkungan geografis yang memberikan ciri dan kualitas pada produk yang dihasilkan (Ellyanti Ellyanti, Abubakar Karim, Hairul Basri, 2005). Dengan kata lain perlindungan terhadap indikasi geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil industri tertentu lainnya, sebagai contoh, salak pondoh, markisa malino, sutra mandar, dan lain-lain (Ahmadi Miru, 2005).

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi sifat ciri khas, keunikan, dari pemalsuan atau pemanfaatan yang

tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan indikasi geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Manfaat perlindungan Indikasi Geografis adalah:

1. Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis;
2. Menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis;
3. Menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen;
4. Membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk;
5. Meningkatnya produksi dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik;
6. Reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan

berdampak pada pengembangan agrowisata, ([https://www.dgip.go.id/Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM, 2022](https://www.dgip.go.id/Direktorat_Jendral_Kekayaan_Intelektual_Kemenkum_dan_HAM,2022)).

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa keberadaan produk unggul yang memiliki nilai keunikan atau kekhasan spesifik lokasi perlu dijaga kelestariannya. Untuk menjaga kelestariannya diperlukan upaya yang kuat untuk melindunginya. Disinilah pentingnya makna perlindungan Indikasi Geografis untuk suatu produk unggulan yang dimiliki oleh suatu daerah, maka menurut undang-undang dapat dilindungi dengan cara mendaftarkannya. Indikasi Geografis tidak dapat secara serta merta dilindungi oleh hukum Indonesia apabila tidak dilakukan pendaftaran sebelumnya, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 angka (1) bahwa “Indikasi Geo-grafis akan dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri”.

Artinya Indikasi Geografis di Indonesia menganut sistem *first to file principle* (Budi Agus Riswandi, 2005). Selanjutnya untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada angka (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan permohonan kepada Menteri. Indikasi Geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:

- a) Sumber daya alam;
- b) Barang kerajinan tangan; atau
- c) Hasil industri.

2. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Sama, dengan perlindungan merek di Indonesia, perlindungan Indikasi Geografis juga mensyaratkan adanya suatu proses permohonan pendaftaran. Hanya saja pendaftaran dilakukan oleh kelompok masyarakat atau institusi yang mewakili atau memiliki kepentingan atas produk bersangkutan. Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis tersebut didaftarkan Adapun kelompok masyarakat tersebut adalah lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan Indikasi Geografis dan lembaga itu merupakan lembaga pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain.

Peraturan Pemerintah Nomor. 51 Tahun 2007 Tentang Tata cara pendaftaran Indikasi Geografis menyebutkan bahwa untuk mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yaitu:

1. Mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dalam rangkap 3 dan diketik dalam bahasa Indonesia;

2. Surat permohonan pendaftaran dilampiri dengan:
 - a) surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;
 - b) bukti pembayaran biaya permohonan;
 - c) 10 lembar etiket Indikasi Geografis (ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 5x5 cm);
 3. Permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis yang terdiri atas:
 4. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 5. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 6. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
 7. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 8. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis dan harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 9. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
 10. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 11. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 12. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.
- Walaupun Indikasi Geografis hanya menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor geografis memberikan ciri atau kualitas tertentu, tidak semua permohonan pendaftaran indikasi geografis dapat diterima untuk didaftar karena permohonan pendaftaran indikasi geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal. Seperti yang diatur dalam Pasal 56 angka (1) Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan jika:
1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan,

- moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
2. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang dan/atau kegunaannya.
 3. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia ialah sistem konstitutif yang mensyaratkan adanya pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan dari negara (Purnama Hadi Kusuma, Kholis Roisah, 2022)

Sebagaimana pula perlindungan merek, ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menunjukkan bahwa proses perlindungan Indikasi Geografis ialah menganut sistem *first to file*, yaitu adanya perlindungan hukum Indikasi Geografis bagi mereka yang pertama kali mendaftarkannya. Maka konsekuensi dari penerapan sistem konstitutif adalah bahwa hanya indikasi geografis yang terdaftar yang dilindungi pemerintah.

Disamping Peraturan Pemerintah Nomor. 51 Tahun 2007 secara detil mengenai teknis dan tata cara permohonan pendaftaran indikasi geografis terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis

Berbeda dengan perlindungan merek, Indikasi Geografis tidak mengenal batas waktu perlindungan sepanjang karakteristik yang menjadi unggulannya masih tetap dapat dipertahankan. Indikasi-geografis diindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi geografis tersebut masih ada. dari segi jangka waktu perlindungan hukum terhadap indikasi geografis ini tidak didasarkan pada tengah waktu/tempo waktu. Akan tetapi, perlindungan terhadap indikasi geografis sangat ditentukan oleh ciri dan/atau kualitas dari indikasi geografis sendiri. Pasal 56 ayat (7) UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan; Indikasi geografis terdaftar mendapatkan perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa konsekuensi untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran. Dengan kata lain perlindungan

Indikasi Geografis di Indonesia menganut sistem *first to file principle*, negara akan memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang pertama kali mendaftarkan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis diberikan sepanjang karakteristik yang menjadi unggulannya masih tetap ada dapat dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- OK Saidi, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

B. Journal

- A.A Ngurah Tresna Adnyana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dari Tindakan Peniruan', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8 No. 1 Mei 2019, P-ISSN:2302-528X, E-ISSN: 2502-3101.
- Budi Agus Riswandi, 'Pengaturan Hukum Merek Atas Indikasi Geografis', *Jurnal Hukum*. No. 29 Vol. 12, 2005.
- Ellyanti Ellyanti, Abubakar Karim, Hairul Basri, 'Analisis Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten', *Jurnal Agrista*, Unsyiah, 2005.

Devica Rully Masrur, 2018, 'Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional', *Lex Jurnalica*, Volume 15 Nomor 2, Agustus 2018.

Indra Rahmatullah, 'Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon'. *Jurnal Cita Hukum*, Vol II No. 2 Desember 2014 ISSN: 2356-1440. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

M. Rendi Aridhayandi, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, tahun Ke-48 No.4 Oktober-Desember 2018.

Purnama Hadi Kusuma, 'Kholis Roisah, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum*, Fakultas Hukum, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, Universitas Diponegoro.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia).

Peraturan Pemerintah Nomor. 51 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

D. Internet

[https://www.dgip.go.id/Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM](https://www.dgip.go.id/Direktorat%20Jendral%20Kekayaan%20Intelektual%20Kemenkum%20dan%20HAM), 2022).